

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, SENJATA API,
AMUNISI, ATAU BAHAN PELEDAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2019/PN.SRL)**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

ADITYA PERMANA
NPM. 1910012111166

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BUNG HATTA
PADANG
2023**

No Reg: 16/PID/02/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 16/PID/02/II-2023

Nama : Aditya Permana
NPM : 1910012111166
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa
Senjata Api, Amunisi, atau bahan Peledak (Studi
Perkara Nomor 96/pid.Sus/2019/PN.SRL)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)  _____

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWASENJATA API,
AMUNISI, ATAU BAHAN PELEDAK
(STUDI PERKARA NOMOR 96/PID.SUS/2019/PNSRL)**

Aditya Permana¹, Syafridatati, S. H., M. H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: adityapermana.ap7.ap@gmail.com

ABSTRAK

The Criminal acts without the right to control, carry, firearms, ammunition or explosives are regulated in Article 1 Paragraph (1) of the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. As contained in decision number 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl. Objective: 1) To analyze the judge's considerations in imposing a sentence for perpetrators of criminal acts without the right to control, carry, firearms, ammunition, or explosives 2) To analyze the application of punishment for perpetrators of criminal acts without the right to possess, carry, firearms, ammunition or explosives. The type of research used is normative juridical; data sources used secondary data (primary, secondary, and tertiary legal materials); data collection techniques with document studies; data analyzed qualitatively. Research results: 1) Judges' considerations in imposing criminal offenses against perpetrators of crimes without the right to control, carry, firearms, ammunition, or explosives in the form of juridical and non-juridical considerations; 2) In a crime without the right to control, carry, firearms, ammunition or explosives in case number 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl against the perpetrator the Panel of Judges made a decision to release the defendant from all charges.

Keywords: *judge's deliberations, possession rights, firearms, bullets, explosives*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Larangan kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan perwujudan negara hukum. Setiap Warga negara Indonesia yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi ketentuan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1948. Peraturan tersebut dimaksudkan ialah agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan senjata api. Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh

gas yang dihasilkan melalui kecepatan.

Kasus Polisi membahayakan nyawa orang lain dengan senjata api kembali terjadi. Kali ini, seorang polisi menembak polisi lain di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Brigadir RT menembakkan 7 butir peluru ke tubuh rekannya, Bripka RE, hingga tewas di tempat. Menurut keterangan RT, dia tepancing emosi setelah mendengar ucapan RE sebelum kejadian.

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan bahwa fundamental hukum pidana. Untuk itu butuh terdapatnya sesuatu analisis yuridis buat mengkaji menimpa

pertanggungjawaban pidana untuk orang yang menaruh senjata api serta amunisi tanpa izin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul proposal analisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi atau bahan peledak (studi putusan nomor 96/pid.sus/2019/pn.srl).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi, atau bahan peledak?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi, atau bahan peledak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/pid.sus/2019/PN.Srl.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara nomor 96/pid.sus/2019/PN.Srl.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan majelis hukum, teori hukum, serta bisa berbentuk komentar para

sarjana.¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, ialah data berupa dokumen ataupun buku - buku yang berhubungan dengan objek- objek riset, yang meliputi:²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat, semacam undang-undang serta putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer berbentuk hasil riset semacam buku-buku serta harian yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti.³

c. Bahan hukum tersier

Ialah bahan-bahan yang membagikan petunjuk lewat internet, yang berhubungan dengan riset ini dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini bersifat normatif, hingga dalam metode pengumpulan informasi ialah merupakan dengan memakai dokumen/penelitian pustaka.

¹ Bambang Sunggono, 2015, Legal Research Methods, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.41.

² Zainudin Ali, 2013, Undang-Undang Riset Hukum, Sinar Graphic, Jakarta, hlm. 106

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 3

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif pada data sekunder karena penelitian ini bersifat deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Senjata Api, Amunisi, atau Bahan Peledak dalam Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2019/Pn.Srl.

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti. Pertimbangan Non Yuridis berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi diri terdakwa, Keadaan sosial ekonomi terdakwa, Faktor agama terdakwa

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Senjata Api, Amunisi, atau Bahan Peledak dalam Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2019/Pn.Srl.

Berdasarkan Penerapan pidana tujuannya tidak hanya memberikan hukuman yang adil bagi pelaku, akan tetapi bagaimana hukuman tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana kasus perkara Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl dimana Terdakwa merupakan seorang masyarakat sipil dimana terdakwa memiliki senjata api tanpa izin / ilegal tersebut sejak bulan November 2018, Terdakwa tidak mengetahui jenis senjata api yang Terdakwa miliki secara

ilegal/tanpa izin. Terdakwa membeli senjata api dengan harga murah sebagai alat untuk berjaga-jaga.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alasan hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak pada perkara nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.Srl. berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti) dan nonyuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan)
2. Pada Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak dalam perkara perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan kasus memiliki senjata api tanpa izin atau ilegal dengan putusan hakim yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa

tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

B. Saran

1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata api yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata api.
2. Kepolisian juga harus meningkatkan kualitas dalam kendala-kendala peredaran senjata api ilegal, meningkatkan sarana dan prasara untuk mendukung kinerja. Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal. Lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap masyarakat sipil yang memiliki kepemilikan senjata api secara legal

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syafriatati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Legal Research Methods*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2013, *Undang- Undang Riset Hukum*, Sinar Graphic, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api